

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

TAHUN
ANGGARAN
2024



**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Cimahi**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi ini dapat tersusun.

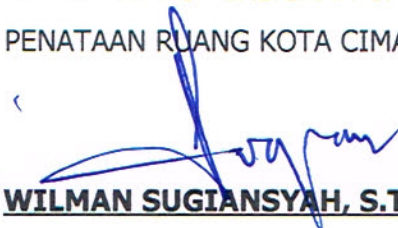
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Cimahi ini disusun sebagai bahan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi Tahun 2024. Laporan ini memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi, visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja. Tujuan dari Laporan Penyusunan ini adalah untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang tercermin dalam system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun dan dilaporkan sebagaimana diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKIP ini berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi dalam rangka melaksanakan Visi dan Misi serta Perencanaan Strategis Kota Cimahi sesuai yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Cimahi Tahun 2023-2026 dengan mengacu Kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah .

Demikian laporan ini kami sampaikan sebagai bahan evaluasi kegiatan pada tahun-tahun mendatang.

Cimahi, Januari 2024

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA CIMAHI,



WILMAN SUGIANSYAH, S.T., M.E.

Pembina Tk. I

NIP. 19790607 200502 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi Tahun 2024 menyajikan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Selama 1 (satu) tahun. Target Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai terdiri dari 4 (empat) Sasaran Strategis. Untuk mengetahui tingkat perubahan naik atau turunnya kinerja yang telah dilaksanakan dapat dilakukan dengan cara mengukur dan membandingkan pencapaian kinerja Tahun 2024 dengan target Renstra Tahun 2023. Selanjutnya digunakan sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya.

Target Kinerja tahun 2024 sebagian besar dapat tercapai. Adapun permasalahan yang menghambat tercapainya target kinerja, dapat diatasi dengan melakukan upaya-upaya solusi yang telah dilaksanakan.

Hasil capaian target kinerja memberi gambaran keberhasilan atau kegagalan Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi. Persentase capaian kinerja yang diukur dari Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Cimahi tahun 2024 dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Persentase Rata -Rata Capaian Sasaran Kinerja
Tahun 2024

No.	Sasaran	Persentase Rata – Rata Capaian
1.	Meningkatnya pelayanan transportasi yang terpadu dan berkualitas	98,43%
2.	Terwujudnya Kualitas Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	74,00 %
3.	Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Perencanaan Tata Ruang	70,92 %
4.	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	81,43

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
Bab I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Isu Strategis	2
1.4. Jumlah Pegawai/ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5
1.5. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7
Bab II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. IKU Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8
2.2. Perjanjian Kinerja	8
2.3. Program Kegiatan dan Anggaran Yang Mendukung Perjanjian Kinerja	10
Bab III PENGUKURAN KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	
3.1. Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi	11
3.1.1 Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi Tahun 2024	15
3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya	17
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Pada Renstra	19
3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional	21
3.1.5 Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan	23
3.1.6 Program yang mendukung	30
3.1.7 Efisiensi Anggaran	30
B. Target Renstra DPUPR 2017 - 2023	43
Bab IV PENUTUP	44

BAB I

PENDAHULUAN

B A B I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Strategi pembangunan Kota Cimahi adalah menumbuhkembangkan pembangunan diberbagai aspek kehidupan masyarakat dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, sehingga pembangunan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat bersama-sama dengan Pemerintah.

Pemerintah sebagai fasilitator pembangunan, memberikan ruang dan arah. Kebijakan ini perlu agar dapat menciptakan sistem pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien. Masyarakat tidak hanya dianggap sebagai objek pembangunan, namun dilibatkan dan ditingkatkan peran sertanya dalam proses pembangunan agar terwujud suatu tatanan pemerintahan yang mantap yang memenuhi dinamika dan kebutuhan masyarakat.

Program pembangunan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang dan berdasarkan skala prioritas pembangunan yang mengacu pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat kota dan diselaraskan dengan RPJMD. Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan tersebut diharapkan dapat mengurangi permasalahan - permasalahan kota serta semaksimal mungkin dapat memenuhi rencana pembangunan di Kota Cimahi.

Instansi Pemerintah mulai dari Pejabat Eselon II, III dan IV didalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan penggunaan sumber daya yang meliputi keseluruhan anggaran keuangan, waktu dan tenaga/SDM yang digunakan dalam memenuhi pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan perencanaan stratejik yang telah dirumuskan sebelumnya.

Dalam hal ini, kinerja merupakan salah satu komponen dari prinsip "*Good Governance*" yang merupakan persyaratan bagi setiap unit kerja pemerintahan dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi. Seiring dengan hal tersebut, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi dimaksudkan untuk melaporkan secara transparan penggunaan seluruh sumber daya yang menjadi kewenangannya kepada semua pihak yang berkepentingan.

Sejak berlakunya Hal ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Penilaian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi yaitu :

1. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Surat Sekretaris Daerah Kota Cimahi No. 060/155/Org. Tanggal 17 Januari 2024 Penyampaian Dokumen SAKIP Perangkat Daerah dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

1.3. Isu Strategis

Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan yang dianggap paling prioritas untuk dilaksanakan dan diselesaikan, baik isu nasional maupun regional. Sesuai isu-isu strategis yang telah dihasilkan dalam tahap perumusan, dituangkan dalam penyajian. Isu strategis merupakan hal terpenting yang harus diperhatikan dan selanjutnya dijabarkan apa manfaat/pengaruh dimasa datang terhadap daerah tersebut.

Isu strategis berdasarkan dari permasalahan pembangunan yang dianggap paling prioritas untuk dilaksanakan. Adapun isu strategis bidang Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi adalah :

a. Penanganan Genangan di Ruas Jalan Kota

Permasalahan yang sering terjadi pada saat musim hujan tiba adalah genangan yang berada di ruas jalan kota, hal ini disebabkan karena terhambatnya aliran air yang berada di saluran samping jalan (drainase jalan). Akibat adanya genangan yang terjadi, sering menyebabkan kerusakan badan jalan dan kemacetan yang cukup panjang.

Terhambatnya aliran air terjadi karena dimensi saluran yang sudah tidak sanggup menampung, karena air yang masuk ke saluran samping tidak hanya dari

badan jalan, melainkan dari lingkungan sekitar, selain itu banyaknya sampah yang menyumbat aliran yang mengakibatkan air meluap dan menggenangi jalan.

Saluran samping jalan adalah saluran yang dibuat di sisi kiri dan kanan dari badan jalan yang berfungsi dan harus diperhitungkan mampu untuk:

- Menampung dan mengalirkan air hujan yang berasal dari permukaan perkerasan jalan.
- Menampung dan mengalirkan air hujan yang berasal dari daerah penguasaan jalan dan atau dari daerah pengaliran (*catchment area*) di sekitar saluran samping jalan.

Berdasarkan kondisi permasalahan yang terjadi, maka langkah strategis untuk mengantisipasi hal tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Bina Marga Kota Cimahi pada tahun 2024 melakukan Pembangunan dan perbaikan saluran samping diantaranya di ruas jalan:

- Jalan Sukarasa
- Jalan Permana
- Jalan Cimenteng
- Jalan Cireunde
- Jalan Rancabali
- Jalan Melong Raya
- Jalan Karya Bakti

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Bina Marga Kota Cimahi juga melakukan pemeliharaan rutin seperti pengerukan sedimentasi dan pembersihan sampah terhadap saluran-saluran samping jalan yang sudah ada.

Selain melakukan perbaikan, pembangunan saluran, dan pemeliharaan rutin saluran samping jalan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi berkolaborasi dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Cimahi untuk mengatasi genangan-genangan yang ada di Kota Cimahi.

b. Kurangnya perawatan, pemeliharaan maupun penataan kembali sarana dan prasarana perkantoran pemerintah daerah Kota Cimahi

Permasalahan pelayanan terhadap masyarakat masih belum optimal dikarenakan sarana dan prasarana kantor yang masih kurang akan pemeliharaan, perawatan maupun penataan kembali ruangan kantor, dimana hal tersebut dapat menambah keefektifan dalam pelaksanaan pemberian pelayanan kepada masyarakat, dan agar bangunan gedung tersebut dapat berfungsi secara optimal. Pemeliharaan maupun perawatan bangunan gedung kantor ini merupakan

serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menjaga kondisi fisik dan fungsi bangunan gedung agar tetap baik.

Dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan perkantoran, adanya pemeliharaan/perawatan sarana dan prasarana tentunya sangat membantu kelancaran serta efisiensi prosesnya. Pada dasarnya fungsi dari sarana dan prasarana bergantung pada penggunaan dan bidangnya. Secara umum sarana dan prasarana mempunyai fungsi utama yaitu :

- Mempermudah proses kerja;
- Mempercepat proses kerja;
- Meningkatkan produktivitas; dan
- Menghasilkan *output* yang berkualitas.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi pada tahun 2024 telah melaksanakan pemeliharaan, perawatan maupun penataan kembali sarana dan prasarana gedung perkantoran pemerintah daerah kota Cimahi.

c. Pembangunan yang tidak berizin dan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota Cimahi

Permasalahan pembangunan yang tidak memiliki izin dari pemerintah kota telah membuat wajah kota menjadi tidak teratur dan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan pengawasan dan pengendalian mengenai izin lokasi agar pembangunan di Kota Cimahi dapat disesuaikan kembali dengan arahan yang termuat di dalam RTRW Kota Cimahi. Maraknya pembangunan tanpa izin di Kota Cimahi diakibatkan oleh masih kurangnya kesadaran masyarakat terkait informasi tata ruang dan pentingnya perizinan dalam pembangunan.

Langkah strategis untuk menangani isu strategis di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui Bidang Tata Ruang, pada tahun 2024 telah melaksanakan :

- Pelaksanaan monitoring kegiatan pembangunan secara berkala di Kota Cimahi oleh tenaga surveyor.
- Penindakan terhadap bangunan atau kegiatan pembangunan yang tidak memiliki izin maupun pembangunan yang menyalahi izin yang sudah disetujui. Pada tahun 2024 telah diterbitkan 151 surat peringatan. Penindakan ini menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran Masyarakat terkait perizinan pembangunan ini.

- Penerbitan Dokumen Penilaian Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) sebagai langkah awal untuk mengajukan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Pada tahun 2024 telah terbit 8 Dokumen Penilaian untuk PKKPR kegiatan berusaha dan 151 Dokumen Penilaian untuk PKKPR Non Berusaha.
- Penerbitan Dokumen Pertimbangan Teknis (Pertek) Tata Ruang sebagai pelengkap untuk PKKPR Otomatis terkait Arahan Tata Ruangnya, agar dapat mengajukan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Pada tahun 2024 telah terbit 184 Dokumen Pertimbangan Teknis (Pertek) Tata Ruang.
- Pelaksanaan konsultasi untuk persiapan Persetujuan Substansi di Direktorat Jendral Tata Ruang Kementerian ATR/BPN untuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cimahi. Dimana RTRW Kota Cimahi ini menjadi acuan dasar dalam pelaksanaan tata ruang kota.

Penyusunan ketentuan teknis untuk muatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Cimahi. RDTR merupakan rencana tata ruang yang lebih rinci dari RTRW, sehingga diharapkan arahan tata ruang akan lebih jelas lagi.

1.4. Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi

Dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), Pemerintah Daerah Kota Cimahi telah membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Nomor 207 Tahun 2016). Perangkat Daerah dibentuk dengan memperhatikan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.5. Jumlah Pegawai/ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi

Pada saat ini Dinas PUPR Kota Cimahi didukung oleh pegawai berjumlah 78 orang, yang terdiri dari :

- 1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 41 orang
- 2. Pegawai Tenaga Harian Lepas sebanyak 37 orang

Jumlah pegawai berdasarkan golongan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

DAFTAR PEGAWAI DINAS PUPR BERDASARKAN
PANGKAT/GOLONGAN TAHUN 2024

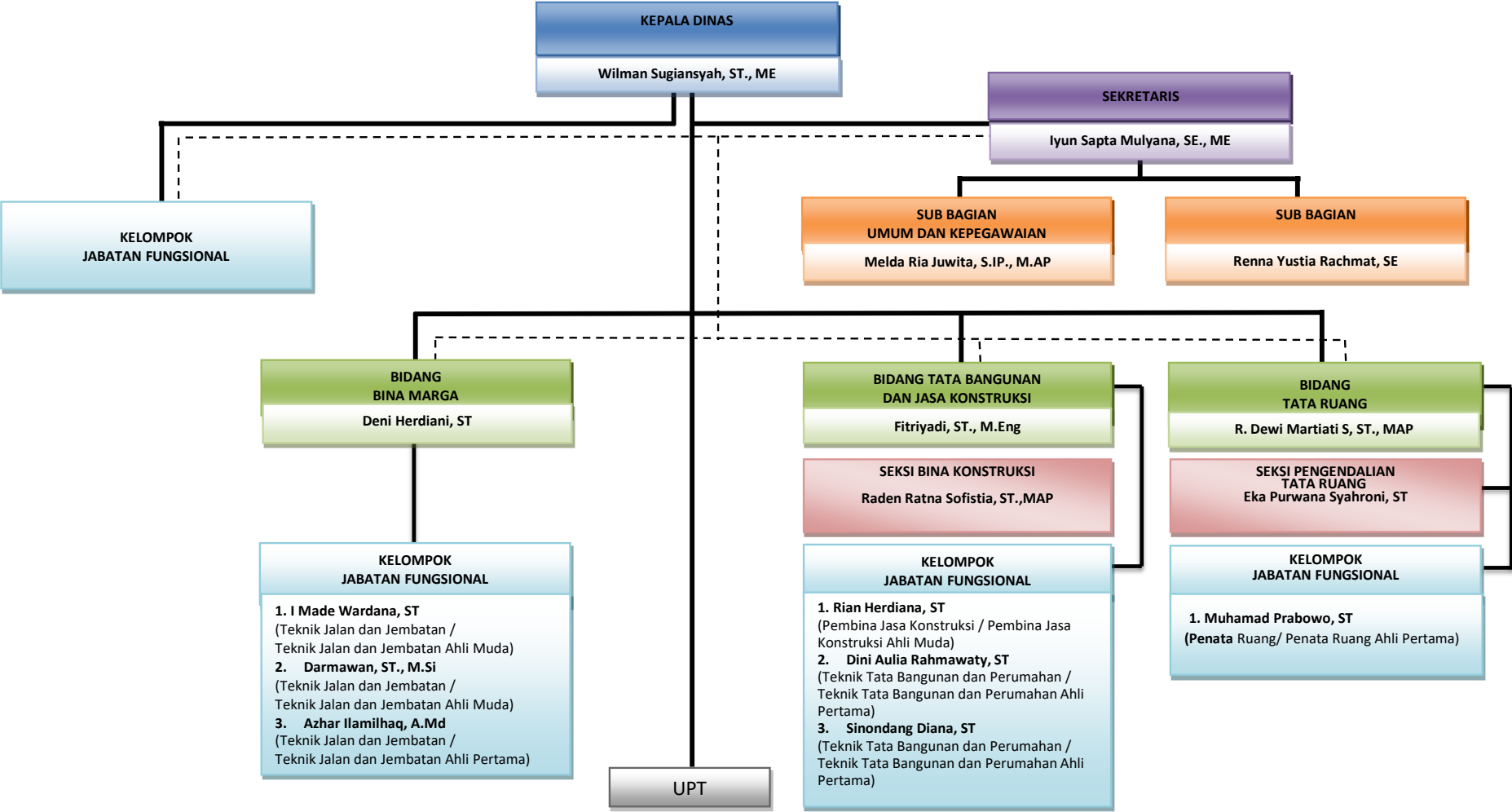
No	Golongan	A	B	C	D	Jumlah
1	IV	4	2	-	-	6
2	III	16	4	4	8	32
3	II	-	1	1	1	3
4	I	-	-	-	-	-
Jumlah						41

Tabel 1.2

DAFTAR PEGAWAI DINAS PUPR BERDASARKAN
TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2024

No	Pendidikan	PNS	Tenaga Harian Lepas	Jumlah
1	SD		26	26
2	SLTP	1	1	2
3	SLTA	5	2	7
4	DIPLOMA	3	1	4
5	S1	24	7	31
6	S2	8	-	8
7	S3	-	-	-
Jumlah		41	37	78

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA CIMAHI



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

B A B II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya Pelayanan Transportasi yang Terpadu dan Berkualitas	Persentase tingkat kemantapan jalan kota	Kapasitas jalan sampai dengan tahun n-1 ditambah penambahan kapasitas jalan tahun n	98,43 %
2	Terwujudnya Kualitas Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	Persentase Bangunan Gedung Negara dengan Kondisi Baik	Persentase bangunan sampai dengan tahun n-1 ditambah penambahan prosentase bangunan tahun n	74,00 %
		Persentase jasa konstruksi tenaga terampil yang bersertifikasi	--	17,62
3	Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Perencanaan Tata Ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	(Luas kawasan yang didirikan sesuai RTRW / Luas seluruh kawasan) x 100%	70,92 %
4	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	--	81,43

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan

dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui berbagai kegiatan tahunan.

Berikut adalah target pencapaian yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/Rencana Strategis (Renstra) 2023 - 2026 untuk lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi pada tahun 2024 yang dituangkan dalam Perjannjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 :

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kemandapan jalan kota	Panjang jalan kota jalan dalam kondisi mantap (km)	101,336 km
		Panjang drainase jalan (km)	2,302 km
		Panjang trotoar jalan (km)	0,079 km
		Panjang jembatan kota dalam kondisi mantap (m)	2,661,50 m
		Jumlah ruas jalan yang di inspeksi	108 ruas
		Jumlah jembatan yang di inspeksi	28 ruas
2	Meningkatkan kualitas dan kuantitas gedung pemerintah kota	Jumlah Bangunan Gedung	1 unit
		Jumlah bangunan gedung yang direhabilitasi	1 unit bangunan
		Jumlah tukang disertifikatkan	60 orang
		Jumlah peserta sosialisasi	60 orang
		Jumlah Verifikasi Bangunan Pemerintah untuk Dikaji Laik Fungsi	2 unit bangunan
3	Meningkatnya kepatuhan terhadap rencana rinci tata ruang	Jumlah dokumen kebijakan	2 dokumen
		Frekuensi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang	12 bulan
		Jumlah pemantauan pelaksanaan ijin pemanfaatan ruang	40 berkas
4	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	81,43

2.3. Program/Kegiatan dan Anggaran yang mendukung Perjanjian Kinerja

Selanjutnya kami sampaikan program dan anggaran yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi pada Perjanjian Kinerja Perubahan Kota Cimahi tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Utama Kota Cimahi, dengan Jumlah belanja langsung sebesar **Rp. 58.489.622.223,-** atau **84,23%** dari total SKPD pada Tahun 2024 sebesar **Rp. 49.266.722.274,-** dan untuk capaian kinerja **99,54%**

Dalam rangka mencapai target-target tersebut, telah dirancang rincian Program dan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi pada Tahun 2024 sebagai berikut :

NO :	PROGRAM :	ANGGARAN :	
		Rp.	58.489.622.223
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	9.597.980.200
2	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp.	31.934.483.100
3	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp.	14.592.906.173
4	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp.	975.599.750
5	Program Penyelenggaraan Penataaan Tata Ruang	Rp.	1.388.653.000

BAB III

PENGUKURAN KINERJA

B A B III
PENGUKURAN KINERJA

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja merupakan jawaban perjanjian kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai program, kebijakan, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi instansi pemerintah. Tabel 3.1. menjelaskan pengukuran kinerja yang menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi.

**3.1. Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi
Tahun 2024**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1.	Meningkatnya kemantapan jalan kota	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Jumlah Dokumen DED	11 Dokumen	9 Dokumen	81,82%
		Jumlah Dokumen Pengawasan	11 Dokumen	6 Dokumen	54,55%
		Jumlah Ruas Jalan Lingkungan yang Dipelihara	50 Paket	17 Paket	34,00%
		Jumlah Ruas Jalan Kota yang Dipelihara	8 Paket	8 Paket	100%
		Luas Tanah yang dibebaskan	1070 m ²	1070 m ²	100%
		Jumlah Ruas Jalan Kota yang Dilebarkan	1 Paket	0 Paket	0,00%
		Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	5 Jembatan	3 Jembatan	60,00%
		Jumlah Ruas Jalan Kota yang Diinspeksi	108 Ruas	58 Ruas	100%

		Jumlah Ruas Jembatan Kota yang Diinspeksi	28 Ruas	28 Ruas	100%
		Jumlah Data dan Informasi terkait Kondisi Jalan dan Jembatan	7 Dokumen	7 Dokumen	100%
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	40 km	40 km	100%
2.	Terwujudnya kualitas bangunan gedung dalam kondisi baik	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan	1 Bangunan Gedung	1 Bangunan Gedung	100%
		Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	3 Bangunan Gedung	3 Bangunan Gedung	100%
		Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%
		Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	5 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	8 Dokumen	15 Dokumen	100%
		Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	25 Orang	25 Orang	100%
		Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan	62 Dokumen	62 Dokumen	100%

		Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG			
		Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	50 Orang	41 Orang	100%
		Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	25 Lembaga	25 Lembaga	100%
		Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	50 Orang	50 Orang	100%
		Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	1 Perangkat Pendukung	1 Perangkat Pendukung	100%
		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	1 Bangunan Konstruksi	1 Bangunan Konstruksi	100%

		Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	50 Lembaga	50 Lembaga	100%
3.	Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Perencanaan Tata Ruang di Kota Cimahi	Jumlah dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kab/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	300 Orang	250 Orang	100%
		Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kab/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Jumlah dokumen Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	49 Layanan	49 Layanan	100%
		Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		Jumlah dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
4.	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	56	56	81,43%

3.1.1 Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi Tahun 2024

Perbandingan target kinerja dengan realisasi tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut :

a. Bina Marga



Kualitas Dinas PUPR Kota Cimahi menunjukkan kondisi yang lebih baik. Kondisi ini mengindikasikan keadaan **Dinas PUPR memberikan daya dukung yang baik bagi kelangsungan hidup masyarakat**. Adapun capaian **indeks kualitas Dinas PUPR** Kota Cimahi pada tahun 2024 sangat baik dengan capaian kinerja 100% dari target sebesar 98,00 poin dan terealisasi sebesar 98,43 poin.

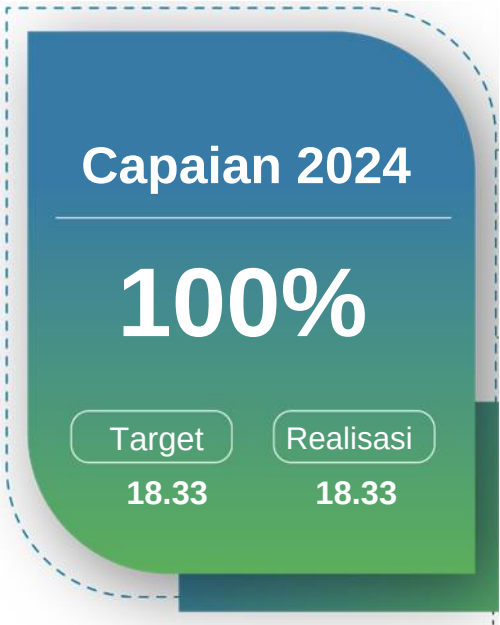
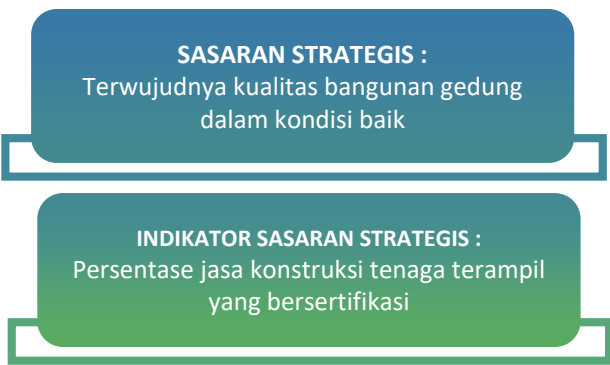
b. Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi

- Penataan Bangunan Gedung



Kualitas Dinas PUPR Kota Cimahi menunjukkan kondisi yang lebih baik. Kondisi ini mengindikasikan keadaan **Dinas PUPR memberikan daya dukung yang baik bagi kelangsungan hidup masyarakat**. Adapun capaian **indeks kualitas Dinas PUPR** Kota Cimahi pada tahun 2024 sangat baik dengan capaian kinerja 100% dari target sebesar 74,00 poin dan terealisasi sebesar 74,00 poin.

- **Persentase jasa konstruksi tenaga terampil yang bersertifikasi**



Kualitas Dinas PUPR Kota Cimahi menunjukkan kondisi yang lebih baik. Kondisi ini mengindikasikan keadaan **Dinas PUPR memberikan daya dukung yang baik bagi kelangsungan hidup masyarakat**. Adapun capaian **indeks kualitas Dinas PUPR** Kota Cimahi pada tahun 2024 sangat baik dengan capaian kinerja 100% dari target sebesar 18,33 poin dan terealisasi sebesar 18,33 poin.

c. Tata Ruang



Kualitas Dinas PUPR Kota Cimahi menunjukkan kondisi yang lebih baik. Kondisi ini mengindikasikan keadaan **Dinas PUPR memberikan daya dukung yang baik bagi kelangsungan hidup masyarakat**. Adapun capaian **indeks kualitas Dinas PUPR** Kota Cimahi pada tahun 2024 sangat baik dengan capaian kinerja 100% dari target sebesar 70,92 poin dan terealisasi sebesar 70,92 poin.

d. Sekretariat



Kualitas Dinas PUPR Kota Cimahi menunjukan kondisi yang lebih baik. Kondisi ini mengindikasikan keadaan **Dinas PUPR memberikan daya dukung yang baik bagi kelangsungan hidup masyarakat**. Adapun capaian **indeks kualitas Dinas PUPR** Kota Cimahi pada tahun 2024 sangat baik dengan capaian kinerja 100% dari target sebesar 81,43 poin dan terealisasi sebesar 81,43 poin.

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

a. Bina Marga



Dari segi realisasi, Dinas PUPR meningkat 0,50 poin dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 sebesar 97,93 poin dan tahun 2024 sebesar 98,43 poin. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, Dinas PUPR menurun sebesar 0,00% dari capaian kinerja tahun 2023 sebesar 97,93% dan pada tahun 2024 sebesar 98,43%

b. Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi

- Penataan Bangunan Gedung



Dari segi realisasi, Dinas PUPR meningkat 1,00 poin dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 sebesar 73,50 poin dan tahun 2024 sebesar 74,00 poin. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, Dinas PUPR menurun sebesar 0,00% dari capaian kinerja tahun 2023 sebesar 73,50% dan pada tahun 2024 sebesar 74,00%

- Persentase jasa konstruksi tenaga terampil yang bersertifikasi



Dari segi realisasi, Dinas PUPR meningkat 2,76 poin dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 sebesar 14,86 poin dan tahun 2024 sebesar 17,62 poin. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, Dinas PUPR menurun sebesar 0,00% dari capaian kinerja tahun 2023 sebesar 14,86% dan pada tahun 2024 sebesar 17,62%

c. Tata Ruang



Dari segi realisasi, Dinas PUPR meningkat 0,50 poin dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 sebesar 70,42 poin dan tahun 2024 sebesar 70,92 poin. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, Dinas PUPR menurun sebesar 0,00% dari capaian kinerja tahun 2023 sebesar 70,42% dan pada tahun 2024 sebesar 70,92%

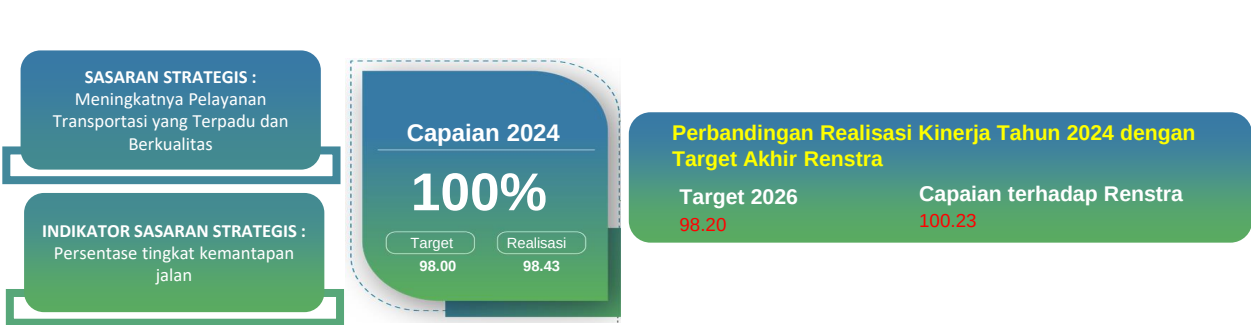
d. Sekretariat



Dari segi realisasi, Dinas PUPR meningkat 0,01 poin dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 sebesar 56,00 poin dan tahun 2024 sebesar 81,43 poin. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, Dinas PUPR menurun sebesar 0,00% dari capaian kinerja tahun 2023 sebesar 56,00% dan pada tahun 2024 sebesar 81,43%

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Pada Renstra

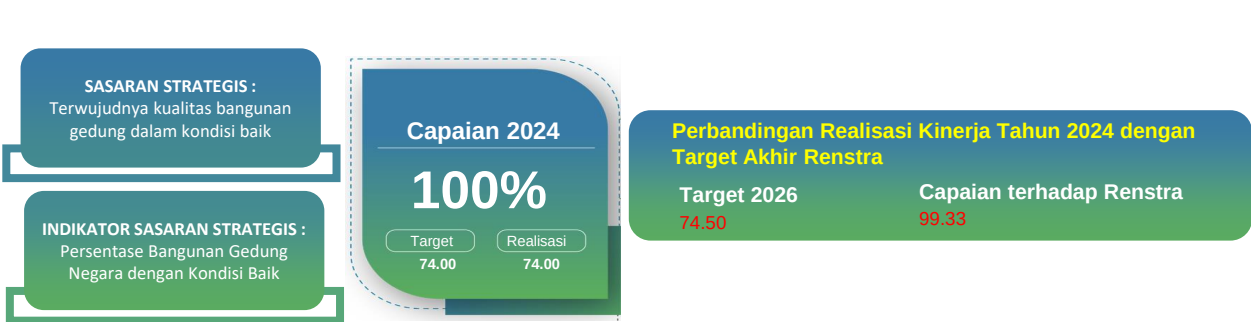
a. Bina Marga



Dilihat dari perspektif perencanaan Jangka menengah, capaian Dinas PUPR Kota Cimahi tahun 2024 sudah ada dalam batas aman yaitu sebesar 100,23% dari target RPJMD sebesar 93,97 poin dan terealisasi 98,43 poin pada tahun 2024.

b. Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi

- Penataan Bangunan Gedung



Dilihat dari perspektif perencanaan Jangka menengah, capaian Dinas PUPR Kota Cimahi tahun 2024 sudah ada dalam batas aman yaitu sebesar 99,33% dari target RPJMD sebesar 74,00 poin dan terealisasi 74,00 poin pada tahun 2024.

- **Persentase jasa konstruksi tenaga terampil yang bersertifikasi**



Dilihat dari perspektif perencanaan Jangka menengah, capaian Dinas PUPR Kota Cimahi tahun 2024 sudah ada dalam batas aman yaitu sebesar 85,16% dari target RPJMD sebesar 17,62 poin dan terealisasi 17,62 poin pada tahun 2024.

c. Tata Ruang



Dilihat dari perspektif perencanaan Jangka menengah, capaian Dinas PUPR Kota Cimahi tahun 2024 sudah ada dalam batas aman yaitu sebesar 98,61% dari target RPJMD sebesar 70,92 poin dan terealisasi 70,92 poin pada tahun 2024.

d. Sekretariat



Dilihat dari perspektif perencanaan Jangka menengah, capaian Dinas PUPR Kota Cimahi tahun 2024 sudah ada dalam batas aman yaitu sebesar 99,98% dari target RPJMD sebesar 56,00 poin dan terealisasi 81,43 poin pada tahun 2024.

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

a. Bina Marga



Analisis perbandingan tidak bisa disajikan karena persentase tingkat kemantapan jalan hanya dilingkungan perangkat daerah kota cimahi saja.

b. Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi

- Penataan Bangunan Gedung



Analisis perbandingan tidak bisa disajikan karena persentase bangunan gedung negara dengan kondisi baik hanya dilingkungan perangkat daerah kota cimahi saja.

- Persentase jasa konstruksi tenaga terampil yang bersertifikasi



Analisis perbandingan tidak bisa disajikan karena persentase jasa konstruksi tenaga terampil yang bersertifikasi hanya dilingkungan perangkat daerah kota cimahi saja.

c. Tata Ruang



Analisis perbandingan tidak bisa disajikan karena persentase Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang hanya dilingkungan perangkat daerah kota cimahi saja.

d. Sekretariat

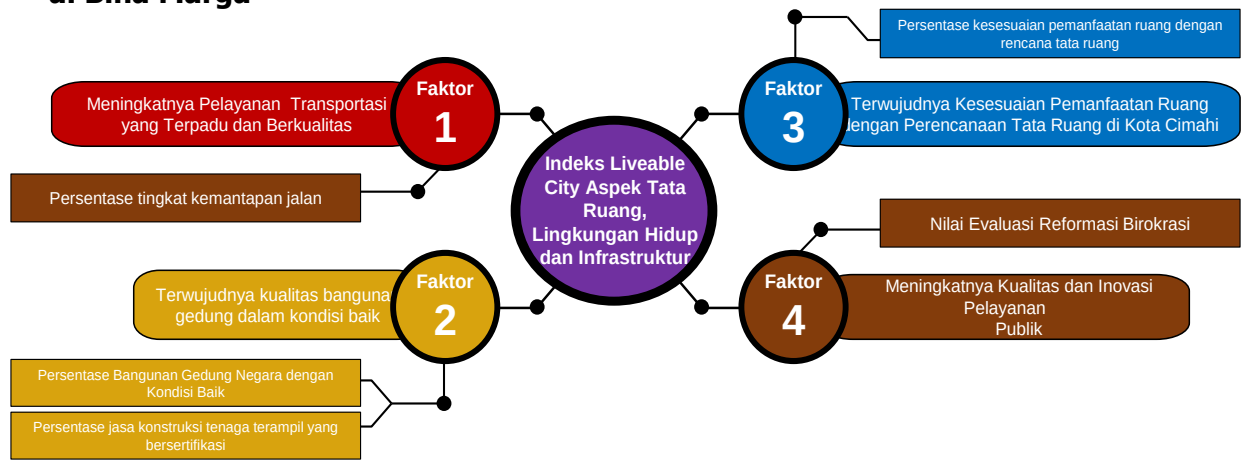


Analisis perbandingan tidak bisa disajikan karena Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi hanya dilingkungan perangkat daerah kota cimahi saja.

3.1.5 Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Dinas PUPR Kota Cimahi dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

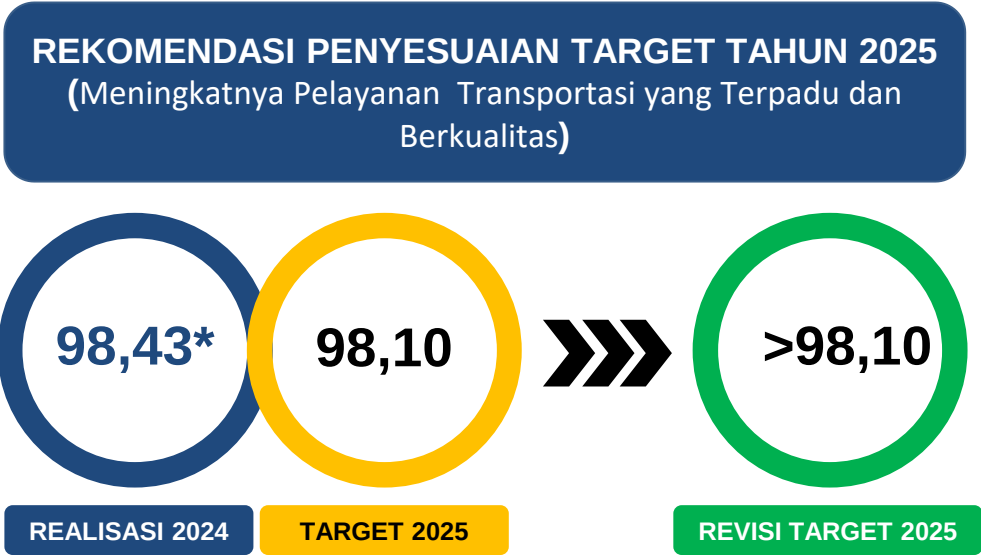
a. Bina Marga



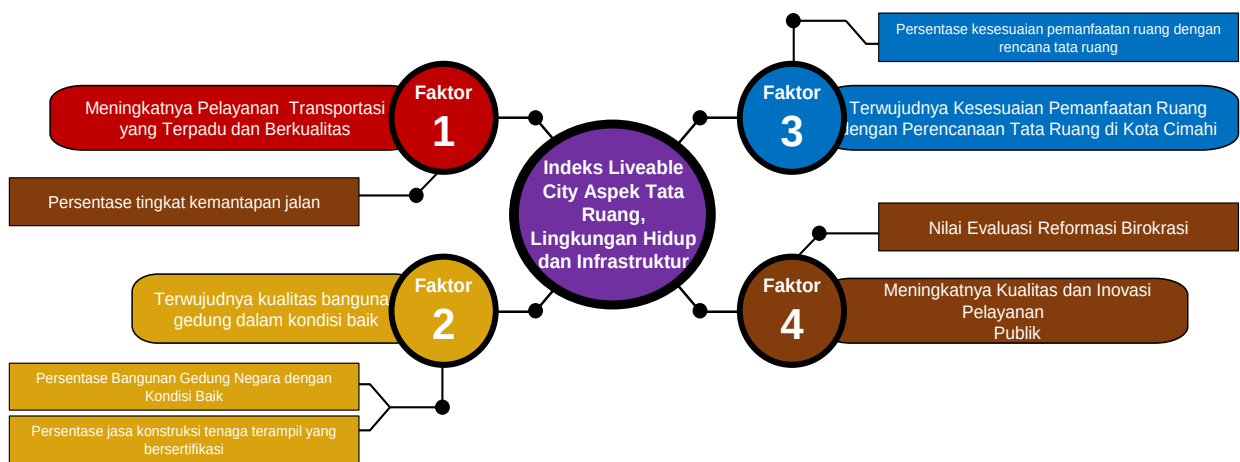
Berdasarkan gambar di atas, persentase tingkat kemantapan jalan dipengaruhi oleh kerusakan permukaan jalan : kerusakan permukaan jalan dapat mengurangi kenyamanan pengguna jalan, kerusakan permukaan jalan dapat memengaruhi kualitas perjalanan, kecepatan tempuh, dan kenyamanan berkendara.

Volume lalu lintas : volume lalu lintas dapat memengaruhi kondisi kemantapan jalan. Ketersediaan dana dan kebijakan yang tepat dapat meningkatkan kondisi jalan mantap. Berdasarkan target yang telah ditetapkan maka kami mengimplementasikan target tersebut melalui sub kegiatan Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan juga Pemeliharaan Rutin jalan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap mantap.

Untuk mengakselerasi kinerja Dinas PUPR pada tahun 2025, maka perlu dilakukan penyesuaian target yang semula sebesar 98,43 menjadi lebih besar dari 98,10 Hal ini didorong juga oleh realisasi Dinas PUPR tahun 2024 sebesar 98,43 sudah melampaui target Dinas PUPR 2025 sebesar 98,10



b. Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi
- Penataan Bangunan Gedung



Berdasarkan gambar di atas, persentase bangunan gedung negara dengan kondisi baik dipengaruhi oleh terpenuhinya standar teknis bangunan gedung pada saat pembangunan bangunan gedung dan juga terlaksananya pemeliharaan/perawatan bangunan gedung negara yang dilakukan untuk menjaga agar bangunan gedung negara beserta sarana dan prasarana tetap dalam kondisi andal dan tetap layak untuk digunakan. Adapun pemeliharaan Bangunan Gedung adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan keadaan suatu bangunan beserta sarana dan prasarannya pada kondisi standar (operasional) sehingga usia pemakaiannya lebih panjang.

Selain itu Pengelolaan Teknis berupa bantuan Teknis yang diberikan kepada Dinas-dinas non teknis yang melakukan pekerjaan Pembangunan maupun pemeliharaan/perawatan konstruksi bangunan oleh Personil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi, dimana hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan penyelenggaraan bangunan gedung negar baik dari tahap persiapan, tahanan perencanaan teknis, tahap pelaksanaan, tahap pemanfaatan bangunan dan tahap pembongkaran dapat berjalan sesuai standar teknis Bangunan Gedung Negara yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang Undang nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung .

Adapun Identifikasi Bangunan Cagar Budaya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi yang dilakukan pada bangunan-bangunan yang telah memiliki Surat Keputusan Bangunan Cagar Budaya yang ditetapkan oleh Wali Kota Cimahi pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga kota Cimahi, Hal ini dimaksudkan agar kajian terkait Identifikasi Bangunan Cagar Budaya ini menghasilkan output berupa Rekomendasi dalam pelestarian dari Bangunan Cagar Budaya tersebut. Pada Tahun 2024 Bangunan Cagar Budaya yang diidentifikasi yaitu Gedung Soedirman dan Penjara Poncol Cimahi.

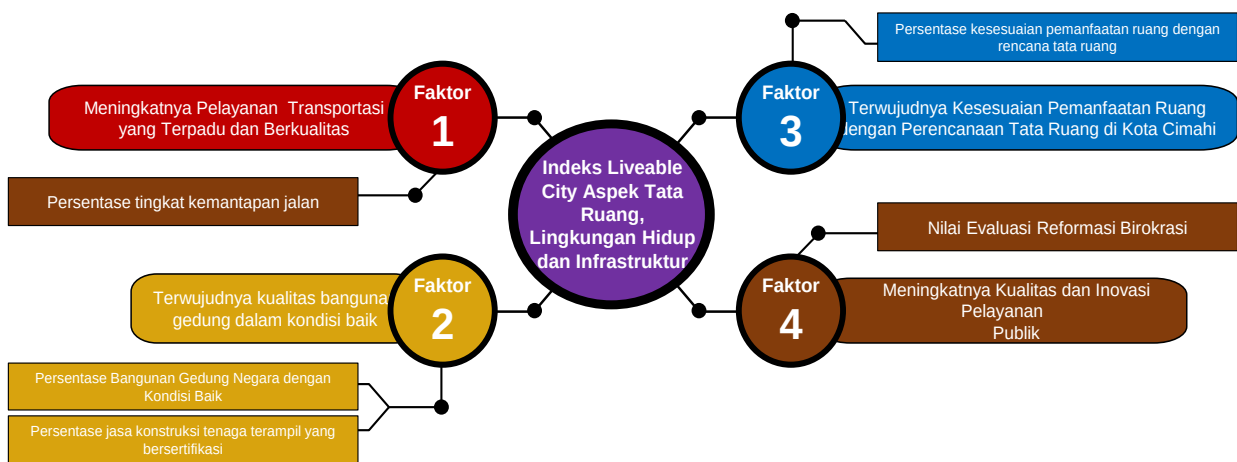
Dalam Penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung, dimana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Pemenuhan Standar Teknis sebagai dasar penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung pada Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi.

Pengkajian Teknis Bangunan Gedung dilaksanakan oleh Konsultan Pengkaji Teknis Bangunan Gedung, hal ini dilakukan sebagai kajian terhadap Bangunan Gedung eksisting untuk mendapatkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dimana kajian tersebut berisi gambaran kondisi suatu bangunan gedung yang sudah terbangun berdasarkan perizinan yang sudah dikeluarkan dan pemenuhan standar teknis berdasarkan fungsi bangunan gedung yang telah dikaji, adapun dalam pemenuhan standar-standar teknis dilakukan pengujian terhadap keamanan, kenyamanan, kesehatan dan kemudahan berupa uji struktur, uji kelembaban, uji pencahayaan, uji kebisingan, dan lain-lain, dimana dalam kajian ini akan memuat temuan dan rekomendasi yang perlu dilakukan oleh pemilik bangunan untuk tetap menjaga bahwa bangunan yang dimilikinya memenuhi standar teknis dan layak digunakan berdasarkan fungsi bangunan.

Untuk mengakselerasi kinerja Dinas PUPR pada tahun 2025, maka perlu dilakukan penyesuaian target yang semula sebesar 73,50 menjadi tetap dari 73,50 Hal ini didorong juga oleh realisasi Dinas PUPR tahun 2024 sebesar 74,00 sudah melampaui target Dinas PUPR 2025 sebesar 74,00



- **Persentase jasa konstruksi tenaga terampil yang bersertifikasi**



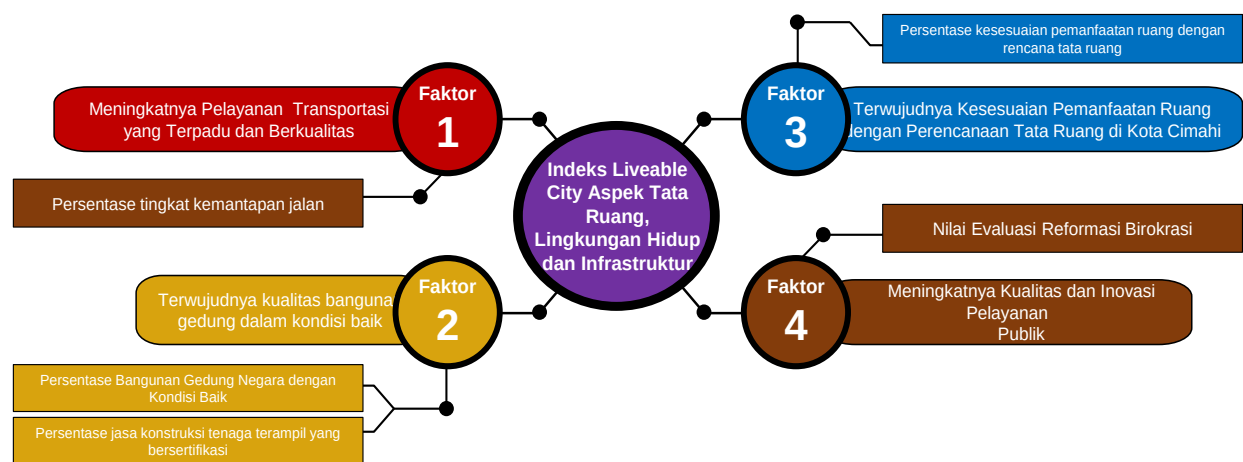
Berdasarkan gambar di atas, persentase jasa konstruksi tenaga terampil yang bersertifikat dipengaruhi oleh Program Pengembangan Jasa Konstruksi dengan indikator program (Jumlah tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat / Jumlah tenaga kerja konstruksi) sesuai dengan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Eselon III.

Untuk mengakselerasi kinerja Dinas PUPR pada tahun 2025, maka perlu dilakukan penyesuaian target yang semula sebesar 19,16 menjadi tetap dari 19,16% Hal ini didorong juga oleh realisasi Dinas PUPR tahun 2024 sebesar 17,62 belum melampaui target Dinas PUPR 2025 sebesar 19,16

Untuk mengakselerasi kinerja Dinas PUPR pada tahun 2025, maka perlu dilakukan penyesuaian target yang semula sebesar 17,62 menjadi tetap dari 17,62% Hal ini didorong juga oleh realisasi Dinas PUPR tahun 2024 sebesar 17,62 belum melampaui target Dinas PUPR 2025 sebesar 19,16



c. Tata Ruang

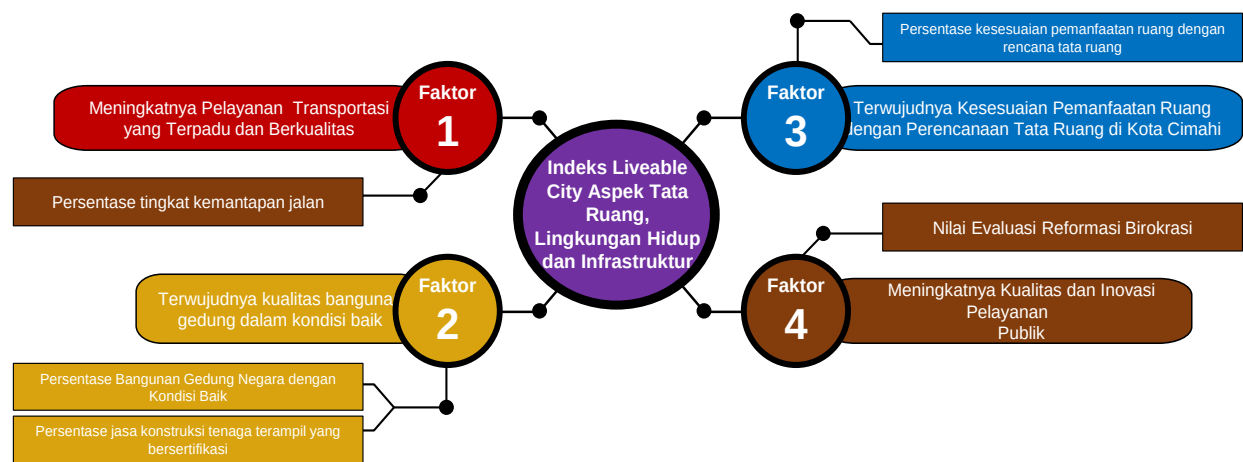


Berdasarkan gambar di atas, Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dipengaruhi oleh perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan pemanfaatan ruang kota diwujudkan dengan tersusunnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai pedoman pemanfaatan ruang agar setiap kegiatan sesuai dengan lokasi peruntukannya. Selanjutnya pelaksanaan pemanfaatan ruang yaitu seluruh pembangunan yang dilakukan pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk menunjang kegiatan manusia seperti perumahan, perdagangan, sosial budaya, pariwisata, keamanan, dan kegiatan lainnya harus memiliki perizinan yaitu Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang tersebut maka diperlukan pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan melalui monitoring seluruh kegiatan pembangunan dan pemberian surat peringatan bagi kegiatan yang melanggar ketentuan tata ruang.

Untuk mengakselerasi kinerja Dinas PUPR pada tahun 2025, maka perlu dilakukan penyesuaian target yang semula sebesar 70,92 menjadi tetap dari 70,92% Hal ini didorong juga oleh realisasi Dinas PUPR tahun 2024 sebesar 70,92 belum melampaui target Dinas PUPR 2025 sebesar 71,42



d. Sekretariat

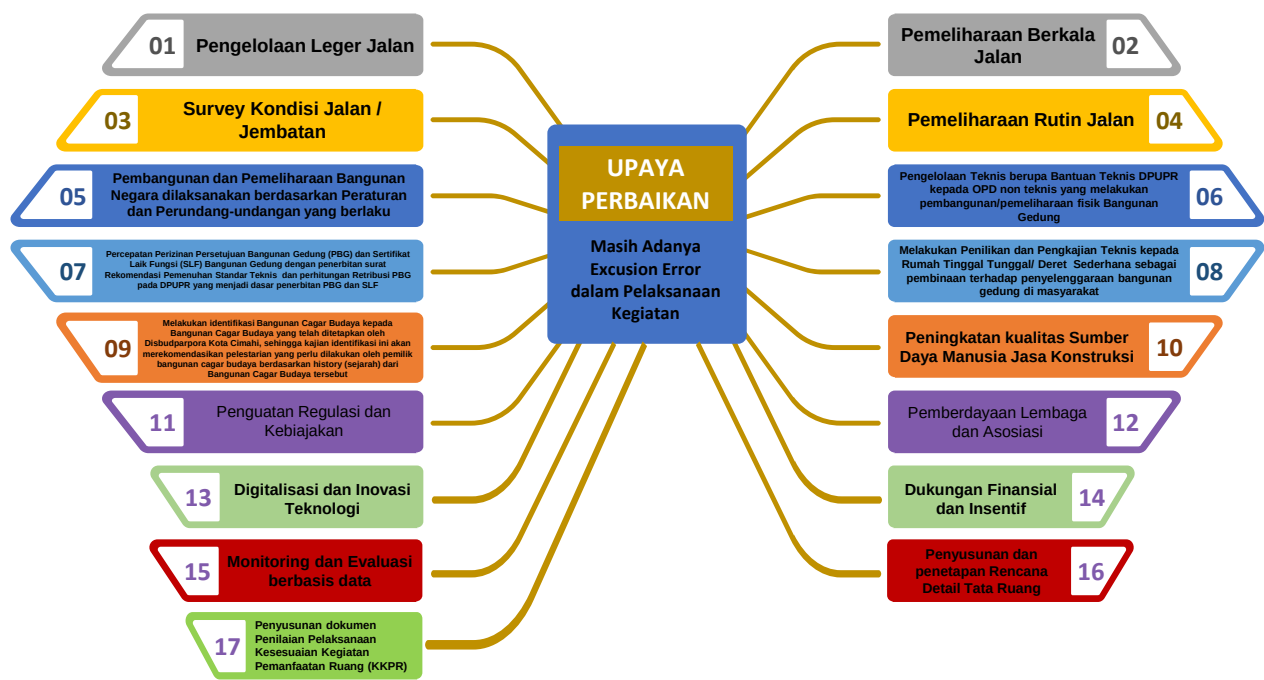


Berdasarkan gambar di atas, Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi dipengaruhi oleh meningkatnya **Capaian Sasaran Strategis** (Nilai SAKIP Perangkat, Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Tindaklanjut Rekomendasi (TLHP), Laporan Realisasi APBD Perangkat Daerah, Indeks Budaya Kerja BerAKHLAK, Nilai Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Tata Kelola PBJ Perangkat Daerah, Indeks Profesionalitas ASN), **Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB** (Tingkat Kematangan SPBE Perangkat Daerah, Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI, Nilai Kualitas Kebijakan Perangkat Daerah, Nilai Kualitas Produk Hukum Perangkat Daerah, Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR), Tingkat Digitalisasi Arsip), **Capaian Strategis Pelaksanaan RB General** (Rencana Aksi Pembangunan RB General, Capaian Rencana Aksi RB General), **Strategi Membangun RB Tematik** (Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik, Capaian Rencana Aksi RB Tematik), **Capaian Dampak RB Tematik** (Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Capaian Kinerja Core Business Organisasi)

Untuk mengakselerasi kinerja Dinas PUPR pada tahun 2025, maka perlu dilakukan penyesuaian target yang semula sebesar 81,43 menjadi tetap dari 81,43% Hal ini didorong juga oleh realisasi Dinas PUPR tahun 2024 sebesar 81,43 belum melampaui target Dinas PUPR 2025 sebesar 81,44



Upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mengakselerasi kinerja Dinas PUPR tahun 2025 dapat dilihat pada gambar berikut :



Berdasarkan gambar di atas, upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mengakselerasi kinerja **Dinas PUPR** meliputi :

1. Pengelolaan Leger Jalan
2. Pemeliharaan Berkala Jalan
3. Survey Kondisi Jalan / Jembatan
4. Pemeliharaan Rutin Jalan
5. Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Negara dilaksanakan berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Pengelolaan Teknis berupa Bantuan Teknis DPUPR kepada OPD non teknis yang melakukan pembangunan/pemeliharaan fisik Bangunan Gedung;
7. Percepatan Perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung dengan penerbitan surat Rekomendasi Pemenuhan Standar Teknis dan perhitungan Retribusi PBG pada DPUPR yang menjadi dasar penerbitan PBG dan SLF;
8. Melakukan Penilikan dan Pengkajian Teknis kepada Rumah Tinggal Tunggal/ Deret Sederhana sebagai pembinaan terhadap penyelenggaraan bangunan gedung di masyarakat
9. Melakukan identifikasi Bangunan Cagar Budaya kepada Bangunan Cagar Budaya yang telah ditetapkan oleh Disbudparpora Kota Cimahi, sehingga kajian identifikasi ini akan merekomendasikan pelestarian yang perlu dilakukan oleh pemilik bangunan cagar budaya berdasarkan history (sejarah) dari Bangunan Cagar Budaya tersebut.
10. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Jasa Konstruksi

11. Penguatan Regulasi dan Kebijakan
12. Pemberdayaan Lembaga dan Asosiasi
13. Digitalisasi dan Inovasi Teknologi
14. Dukungan Finansial dan Insentif
15. Monitoring dan Evaluasi berbasis data
16. Penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang
17. Penyusunan dokumen Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)

3.1.6 Program yang mendukung

Meningkatnya Kualitas **Dinas PUPR** Kota Cimahi didukung oleh 5 program diantaranya adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Jalan, Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, Program Penataan Bangunan Gedung dan Program Pengembangan Jasa Konstruksi.

3.1.7 Efisiensi Anggaran

Anggaran capaian sasaran strategis di atas sebesar 84,23% atau setara Rp. 9.222.899.949,00. Adapun efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp. 58.489.622.223,00 dan terealisasi sebesar Rp. 49.266.722.274,00.

REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2024

NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	REALISASI		PENGUKURAN KINERJA SUB KEGIATAN							PERMASALAHAN DAN SOLUSI
		FISIK (%)	KEU (%)	INDIKATOR			SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										Realisasi sudah sesuai target yang direncanakan
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100,00	97,83	Masukan	1	Dana	Rupiah	66.479.600,00	65.034.072,00	97,83	
					2	SDM	org	15,00	15,00	100,00	
					3	Waktu	bulan	12,00	12,00	100,00	
				Keluaran	1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	9,00	9,00	100,00	
				Hasil	1	Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100,00	100,00	100,00	Realisasi sudah sesuai target yang direncanakan
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	96,27	Masukan	1	Dana	Rupiah	4.499.950,00	4.331.950,00	96,27	
					2	SDM	org	13,00	13,00	100,00	
					3	Waktu	bulan	12,00	12,00	100,00	
				Keluaran	1	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	3,00	3,00	100,00	
				Hasil	1	Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100,00	100,00	100,00	Realisasi sudah sesuai target yang direncanakan
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100,00	98,18	Masukan	1	Dana	Rupiah	7.623.264.100,00	7.484.367.350,00	98,18	
					2	SDM	org	13,00	13,00	100,00	
					3	Waktu	bulan	12,00	12,00	100,00	
				Keluaran	1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	42,00	42,00	100,00	
				Hasil	1	Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100,00	100,00	100,00	Penyelesaian pelaporan keuangan akhir tahun sesuai dengan jadwal yang direncanakan
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100,00	96,00	Masukan	1	Dana	Rupiah	999.800,00	959.800,00	96,00	
					2	SDM	org	13,00	13,00	100,00	
					3	Waktu	bulan	12,00	12,00	100,00	
				Keluaran	1	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1,00	1,00	100,00	
				Hasil	1	Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100,00	100,00	100,00	Realisasi sudah sesuai target yang direncanakan
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	100,00	98,78	Masukan	1	Dana	Rupiah	45.979.750,00	45.420.165,00	98,78	

NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	REALISASI		PENGUKURAN KINERJA SUB KEGIATAN							PERMASALAHAN DAN SOLUSI
		FISIK (%)	KEU (%)	INDIKATOR			SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	
					2	SDM	org	13,00	13,00	100,00	
					3	Waktu	bulan	12,00	12,00	100,00	
				Keluaran	1	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	17,00	17,00	100,00	
				Hasil	1	Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100,00	100,00	100,00	Realisasi sudah sesuai target yang direncanakan
6	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100,00	99,94	Masukan	1	Dana	Rupiah	59.923.000,00	59.885.000,00	99,94	
					2	SDM	org	13,00	13,00	100,00	
					3	Waktu	bulan	12,00	12,00	100,00	
				Keluaran	1	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	80,00	80,00	100,00	
				Hasil	1	Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00	100,00	100,00	
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	82,24	76,66	Masukan	1	Dana	Rupiah	75.660.000,00	57.998.901,00	76,66	
					2	SDM	org	13,00	13,00	100,00	Realisasi sudah sesuai target yang direncanakan
					3	Waktu	bulan	12,00	12,00	100,00	
				Keluaran	1	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	12,00	12,00	100,00	
				Hasil	1	Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100,00	100,00	100,00	
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100,00	99,69	Masukan	1	Dana	Rupiah	102.606.000,00	102.289.300,00	99,69	
					2	SDM	org	13,00	13,00	100,00	
					3	Waktu	bulan	12,00	12,00	100,00	
				Keluaran	1	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	12,00	12,00	100,00	Realisasi sudah sesuai target yang direncanakan
				Hasil	1	Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100,00	100,00	100,00	
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100,00	95,12	Masukan	1	Dana	Rupiah	20.500.000,00	19.500.000,00	95,12	
					2	SDM	org	13,00	13,00	100,00	

NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	REALISASI		PENGUKURAN KINERJA SUB KEGIATAN							PERMASALAHAN DAN SOLUSI
		FISIK (%)	KEU (%)	INDIKATOR			SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	
					3	Waktu	bulan	12,00	12,00	100,00	Realisasi sudah sesuai target yang direncanakan
				Keluaran	1	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	12,00	12,00	100,00	
				Hasil	1	Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100,00	100,00	100,00	
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100,00	100,00	Masukan	1	Dana	Rupiah	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	
					2	SDM	org	13,00	13,00	100,00	
					3	Waktu	bulan	12,00	12,00	100,00	
				Keluaran	1	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	12,00	12,00	100,00	
				Hasil	1	Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100,00	100,00	100,00	Realisasi sudah sesuai target yang direncanakan
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100,00	99,98	Masukan	1	Dana	Rupiah	293.632.000,00	293.583.383,00	99,98	
					2	SDM	org	13,00	13,00	100,00	
					3	Waktu	bulan	12,00	12,00	100,00	
				Keluaran	1	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12,00	12,00	100,00	
				Hasil	1	Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100,00	100,00	100,00	
12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100,00	99,45	Masukan	1	Dana	Rupiah	544.765.000,00	541.748.900,00	99,45	Realisasi sudah sesuai target yang direncanakan
					2	SDM	org	13,00	13,00	100,00	
					3	Waktu	bulan	12,00	12,00	100,00	
				Keluaran	1	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	2,00	2,00	100,00	
				Hasil	1	Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	100,00	100,00	
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100,00	98,31	Masukan	1	Dana	Rupiah	95.352.000,00	93.742.230,00	98,31	Realisasi sudah sesuai target yang direncanakan
					2	SDM	org	13,00	13,00	100,00	
					3	Waktu	bulan	12,00	12,00	100,00	
				Keluaran	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12,00	12,00	100,00	
				Hasil	1	Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	100,00	100,00	

NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	REALISASI		PENGUKURAN KINERJA SUB KEGIATAN							PERMASALAHAN DAN SOLUSI
		FISIK (%)	KEU (%)	INDIKATOR			SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100,00	53,59	Masukan	1	Dana	Rupiah	6.960.000,00	3.730.069,00	53,59	Realisasi sudah sesuai target yang direncanakan
					2	SDM	org	13,00	13,00	100,00	
					3	Waktu	bulan	12,00	12,00	100,00	
				Keluaran	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12,00	12,00	100,00	
				Hasil	1	Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	100,00	100,00	
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100,00	98,14	Masukan	1	Dana	Rupiah	88.249.000,00	86.606.932,00	98,14	Realisasi sudah sesuai target yang direncanakan
					2	SDM	org	13,00	13,00	100,00	
					3	Waktu	bulan	12,00	12,00	100,00	
				Keluaran	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12,00	12,00	100,00	Realisasi sudah sesuai target yang direncanakan
				Hasil	1	Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	100,00	100,00	
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100,00	82,91	Masukan	1	Dana	Rupiah	545.110.000,00	451.958.264,00	82,91	
					2	SDM	org	13,00	13,00	100,00	
					3	Waktu	bulan	12,00	12,00	100,00	
				Keluaran	1	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	11,00	11,00	100,00	
				Hasil	1	Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	100,00	100,00	
II	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG										Tidak ada faktor penghambat dalam pekerjaan ini
17	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	100,00	99,37	Masukan	1	Dana	Rupiah	48.270.000,00	47.967.800,00	99,37	
					2	SDM	org	12,00	12,00	100,00	
					3	Waktu	bulan	12,00	12,00	100,00	
				Keluaran	1	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis DaerahKabupaten/Kota yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan	Bangunan Gedung Cagar Budaya	2,00	2,00	100,00	
				Hasil	1	Dokumen Identifikasi Bangunan Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten Kota	Dokumen	2,00	2,00	100,00	

NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	REALISASI		PENGUKURAN KINERJA SUB KEGIATAN							PERMASALAHAN DAN SOLUSI
		FISIK (%)	KEU (%)	INDIKATOR			SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	
18	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	99,92	98,88	Masukan	1	Dana	Rupiah	4.041.676.000,00	3.996.212.400,00	98,88	Untuk proses serah terima bangunan harus memperhatikan peraturan perundang undangan dan ketentuan yang berlaku
					2	SDM	org	12,00	12,00	100,00	
					3	Waktu	bulan	12,00	12,00	100,00	
				Keluaran	1	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat,dan Diperiksa Berkala	Bangunan Gedung	2,00	2,00	100,00	
				Hasil	1	Dokumen Pelaksanaan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten Kota	Dokumen	6,00	6,00	100,00	
19	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	0,00	0,00	Masukan	1	Dana	Rupiah	50.000.000,00	0,00	0,00	Karena tidak ada peraturan baru, maka anggaran tidak dapat diserap
					2	SDM	org	12,00	12,00	100,00	
					3	Waktu	bulan	12,00	12,00	100,00	
				Keluaran	1	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Dokumen	1,00	0,00	0,00	Kedepannya untuk personel bantek harus ditambah jumlahnya dan sertifikasi untuk bantek harus diperbanyak jumlahnya
				Hasil	1	Draft Dokumen Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Dokumen	1,00	0,00	0,00	
20	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	73,68	62,94	Masukan	1	Dana	Rupiah	11.970.000,00	7.533.550,00	62,94	
					2	SDM	org	12,00	12,00	100,00	
					3	Waktu	bulan	12,00	12,00	100,00	
				Keluaran	1	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan StrategisKabupaten/Kota	Bantuan Teknis	5,00	12,00	240,00	
				Hasil	1	Laporan Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten Kota	Dokumen	5,00	12,00	240,00	

NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	REALISASI		PENGUKURAN KINERJA SUB KEGIATAN							PERMASALAHAN DAN SOLUSI
		FISIK (%)	KEU (%)	INDIKATOR			SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	
21	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	49,43	46,66	Masukan	1	Dana	Rupiah	9.339.534.923,00	4.357.398.650,00	46,66	Percepatan pekerjaan konstruksi pada TW III dan TW IV
					2	SDM	org	12,00	12,00	100,00	
					3	Waktu	bulan	12,00	12,00	100,00	
				Keluaran	1	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	14,00	14,00	100,00	
				Hasil	1	Dokumen Pelaksanaan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten Kota	Dokumen	14,00	14,00	100,00	
22	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	95,18	93,94	Masukan	1	Dana	Rupiah	146.280.000,00	137.411.598,00	93,94	Pelaporan kajian teknis dan penilikan untuk rumah tinggal tunggal/deret sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
					2	SDM	org	12,00	0,00	0,00	
					3	Waktu	bulan	12,00	0,00	0,00	
				Keluaran	1	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	Orang	25,00	25,00	100,00	
				Hasil	1	Dokumen Laporan Penilikan dan Pemeriksaan SLF Rumah Tinggal	Dokumen	25,00	25,00	100,00	
23	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	67,26	60,60	Masukan	1	Dana	Rupiah	955.175.250,00	578.805.551,00	60,60	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG agar lebih ditingkatkan - ada perbaikan target
					2	SDM	org	12,00	12,00	100,00	
					3	Waktu	bulan	12,00	12,00	100,00	

NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	REALISASI		PENGUKURAN KINERJA SUB KEGIATAN							PERMASALAHAN DAN SOLUSI
		FISIK (%)	KEU (%)	INDIKATOR			SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	
				Keluaran	1	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat BuktiKepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), TimProfesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan	Dokumen	62,00	62,00	100,00	
				Hasil	1	Pelaksanaan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian IMB, dan SLF Bangunan Gedung	Dokumen	62,00	62,00	100,00	
III	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN										
24	Pengelolaan Leger Jalan	100,00	99,24	Masukan	1	Dana	Rupiah	300.000.000,00	297.723.000,00	99,24	
					2	SDM	org	13,00	13,00	100,00	
					3	Waktu	bulan	12,00	12,00	100,00	Realisasi sudah sesuai target yang direncanakan
				Keluaran	1	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	Dokumen	3,00	3,00	100,00	
				Hasil	1	Persentase Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	98,00	98,43	100,44	
25	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	100,00	96,39	Masukan	1	Dana	Rupiah	200.000.000,00	192.783.690,00	96,39	
					2	SDM	org	13,00	13,00	100,00	
					3	Waktu	bulan	12,00	12,00	100,00	Realisasi sudah sesuai target yang direncanakan
				Keluaran	1	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Dokumen	1,00	1,00	100,00	
				Hasil	1	Persentase Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	98,00	98,43	100,44	
26	Pemeliharaan Berkala Jalan	98,44	92,80	Masukan	1	Dana	Rupiah	12.764.175.100,00	11.845.344.191,00	92,80	
					2	SDM	org	13,00	13,00	100,00	
					3	Waktu	bulan	12,00	12,00	100,00	Anggaran tidak dapat terserap, Terdapat 2 Paket Pengawasan tidak dapat dilaksanakan karena Anggaran bantuan keuangan provinsi untuk pekerjaan Fisik tidak turun
				Keluaran	1	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	KM	5,00	5,00	100,00	
				Hasil	1	Persentase Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	98,00	98,43	100,44	
27	Pelebaran Jalan Menuju Standar	99,96	86,05	Masukan	1	Dana	Rupiah	12.209.146.000,00	10.506.072.823,00	86,05	
					2	SDM	org	13,00	13,00	100,00	

NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	REALISASI		PENGUKURAN KINERJA SUB KEGIATAN							PERMASALAHAN DAN SOLUSI	
		FISIK (%)	KEU (%)	INDIKATOR			SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)		
					3	Waktu	bulan	12,00	12,00	100,00	Akan dianggarkan kembali pada TA. 2025	
				Keluaran	1	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuiu Standar	KM	0,10	0,10	100,00		
				Hasil	1	Persentase Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	98,00	98,43	100,44		
28	Pemeliharaan Rutin Jembatan	60,00	0,00	Masukan	1	Dana	Rupiah	200.000.000,00	0,00	0,00		
					2	SDM	org	13,00	13,00	100,00		
					3	Waktu	bulan	12,00	12,00	100,00		
				Keluaran	1	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Jembatan	5,00	3,00	60,00		
				Hasil	1	Persentase Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	98,00	98,43	100,44	Realisasi sudah sesuai target yang direncanakan	
29	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	100,00	99,11	Masukan	1	Dana	Rupiah	690.250.000,00	684.076.500,00	99,11		
					2	SDM	org	13,00	13,00	100,00		
					3	Waktu	bulan	12,00	12,00	100,00		
				Keluaran	1	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvev Kondisinya	KM	105,00	105,00	100,00		
				Hasil	1	Persentase Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	98,00	98,43	100,44		
30	Pemeliharaan Rutin Jalan	97,89	92,44	Masukan	1	Dana	Rupiah	5.570.912.000,00	5.149.855.589,00	92,44		Akan dianggarkan kembali TA. 2025
					2	SDM	org	13,00	13,00	100,00		
					3	Waktu	bulan	12,00	12,00	100,00		
				Keluaran	1	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	KM	40,10	40,10	100,00		
				Hasil	1	Persentase Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	98,00	98,43	100,44		
IV	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI										Pekerjaan ini untuk bimbingan teknis pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi untuk ASN DPUPR	
31	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	100,00	96,78	Masukan	1	Dana	Rupiah	99.040.000,00	95.850.200,00	96,78		
					2	SDM	org	12,00	12,00	100,00		
					3	Waktu	bulan	12,00	12,00	100,00		
				Keluaran	1	Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan	Dokumen	1,00	1,00	100,00		
				Hasil	1	Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi Yang Dilatih	Orang	50,00	41,00	82,00		

NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	REALISASI		PENGUKURAN KINERJA SUB KEGIATAN							PERMASALAHAN DAN SOLUSI
		FISIK (%)	KEU (%)	INDIKATOR			SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	
32	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	98,58	95,73	Masukan	1	Dana	Rupiah	196.840.000,00	188.437.900,00	95,73	Untuk pemilihan peserta sertifikasi kedepannya harus lebih selektif dan menyampaikan form kesediaan ikut dalam kegiatan sertifikasi
					2	SDM	org	12,00	12,00	100,00	
					3	Waktu	bulan	12,00	12,00	100,00	
				Keluaran	1	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang DifasilitasiSertifikasi	Orang	50,00	41,00	82,00	
				Hasil	1	Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi Yang Dilatih	Orang	50,00	41,00	82,00	
33	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	100,00	88,94	Masukan	1	Dana	Rupiah	96.760.000,00	86.062.350,00	88,94	Tidak ada kendala
					2	SDM	org	12,00	12,00	100,00	
					3	Waktu	bulan	12,00	12,00	100,00	
				Keluaran	1	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	25,00	25,00	100,00	
				Hasil	1	Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi Yang Dilatih	Orang	50,00	25,00	50,00	
34	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	100,00	97,12	Masukan	1	Dana	Rupiah	198.232.000,00	192.528.102,00	97,12	Diharapkan kegiatan ini bisa menurunkan kemiskinan pada sektor infrastruktur
					2	SDM	org	12,00	12,00	100,00	
					3	Waktu	bulan	12,00	12,00	100,00	
				Keluaran	1	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	Orang	50,00	50,00	100,00	
				Hasil	1	Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi Yang Dilatih	Orang	50,00	50,00	100,00	
35	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	100,00	94,45	Masukan	1	Dana	Rupiah	49.600.000,00	46.849.500,00	94,45	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi agar lebih ditingkatkan
					2	SDM	org	12,00	12,00	100,00	
					3	Waktu	bulan	12,00	12,00	100,00	
				Keluaran	1	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	Perangkat Pendukung	1,00	1,00	100,00	
				Hasil	1	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Dokumen	2,00	2,00	100,00	

NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	REALISASI		PENGUKURAN KINERJA SUB KEGIATAN							PERMASALAHAN DAN SOLUSI
		FISIK (%)	KEU (%)	INDIKATOR			SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	
36	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	99,75	97,62	Masukan	1	Dana	Rupiah	199.456.000,00	194.709.400,00	97,62	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi agar lebih ditingkatkan
					2	SDM	org	12,00	12,00	100,00	
					3	Waktu	bulan	12,00	12,00	100,00	
				Keluaran	1	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	Dokumen	2,00	2,00	100,00	
				Hasil	1	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Dokumen	2,00	2,00	100,00	
37	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	100,00	99,76	Masukan	1	Dana	Rupiah	42.423.750,00	42.321.750,00	99,76	
					2	SDM	org	12,00	12,00	100,00	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota agar lebih ditingkatkan
					3	Waktu	bulan	12,00	12,00	100,00	
				Keluaran	1	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib PemanfaatanProduk	Bangunan Konstruksi	1,00	1,00	100,00	
				Hasil	1	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan TertibPemanfaatan Jasa Konstruksi	Laporan	1,00	1,00	100,00	
38	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	94,26	81,23	Masukan	1	Dana	Rupiah	93.248.000,00	75.746.500,00	81,23	
					2	SDM	org	12,00	12,00	100,00	
					3	Waktu	bulan	12,00	12,00	100,00	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi agar lebih ditingkatkan
				Keluaran	1	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan TertibPemanfaatan Produk	Lembaga	25,00	25,00	100,00	
				Hasil	1	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan TertibPemanfaatan Jasa Konstruksi	Laporan	1,00	25,00	2.500,00	
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG										
39	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	100,00	87,02	Masukan	1	Dana	Rupiah	201.516.000,00	175.359.000,00	87,02	
					2	SDM	org	12,00	12,00	100,00	
					3	Waktu	bulan	12,00	12,00	100,00	

NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	REALISASI		PENGUKURAN KINERJA SUB KEGIATAN							PERMASALAHAN DAN SOLUSI
		FISIK (%)	KEU (%)	INDIKATOR			SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	
				Keluaran	1	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	2,00	2,00	100,00	Sosialisasi dilaksanakan pada bulan desember setelah penetapan RTRW
				Hasil	1	Pelaksanaan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah \$RTRW% dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)	Dokumen	2,00	2,00	100,00	
40	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	100,00	61,77	Masukan	1	Dana	Rupiah	187.462.000,00	115.799.500,00	61,77	
					2	SDM	org	12,00	12,00	100,00	Materi RDTR harus dilakukan penyesuaian dengan RTRW yang telah ditetapkan
					3	Waktu	bulan	12,00	12,00	100,00	
				Keluaran	1	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	Orang	300,00	250,00	83,33	
				Hasil	1	Pelaksanaan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah \$RTRW% dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)	Dokumen	2,00	2,00	100,00	
41	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	100,00	99,20	Masukan	1	Dana	Rupiah	143.217.000,00	142.075.567,00	99,20	
					2	SDM	org	12,00	12,00	100,00	
					3	Waktu	bulan	12,00	12,00	100,00	
				Keluaran	1	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	1,00	1,00	100,00	
				Hasil	1	Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Dokumen	1,00	1,00	100,00	
42	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	90,83	78,24	Masukan	1	Dana	Rupiah	81.795.000,00	63.955.999,00	78,19	
					2	SDM	org	12,00	12,00	100,00	Telah dilaksanakan pada TW IV
					3	Waktu	bulan	12,00	12,00	100,00	
				Keluaran	1	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Dokumen	1,00	1,00	100,00	
				Hasil	1	Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Dokumen	1,00	1,00	100,00	
43	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	100,00	95,23	Masukan	1	Dana	Rupiah	136.384.000,00	126.885.100,00	93,04	
					2	SDM	org	12,00	12,00	100,00	Tidak ada kendala, Tahun depan ada perbaikan target
					3	Waktu	bulan	12,00	12,00	100,00	

NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	REALISASI		PENGUKURAN KINERJA SUB KEGIATAN							PERMASALAHAN DAN SOLUSI
		FISIK (%)	KEU (%)	INDIKATOR		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)		
				Keluaran	1	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Layanan	97,00	158,00	162,89	Adanya pekerjaan swakelola yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan pengajuan biaya yang melebihi pagu dari calon pelaksana (IPB)
				Hasil	1	Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	Dokumen	1,00	1,00	100,00	
44	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	100,00	92,87	Masukan	1	Dana	Rupiah	253.743.000,00	235.655.300,00	92,87	
					2	SDM	org	12,00	12,00	100,00	Tidak ada kendala, Perencanaan penjadwalan yang lebih baik lagi
					3	Waktu	bulan	12,00	12,00	100,00	
				Keluaran	1	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Dokumen	1,00	1,00	100,00	
				Hasil	1	Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	Dokumen	1,00	1,00	100,00	
45	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	100,00	96,10	Masukan	1	Dana	Rupiah	193.680.000,00	186.131.143,00	96,10	
					2	SDM	org	12,00	12,00	100,00	
					3	Waktu	bulan	12,00	12,00	100,00	
				Keluaran	1	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	1,00	1,00	100,00	
				Hasil	1	Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Dokumen	1,00	1,00	100,00	
46	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	100,00	87,53	Masukan	1	Dana	Rupiah	161.800.000,00	141.617.500,00	87,53	Pekerjaan telah dilaksanakan di TW IV. Pekerjaan yang dilakukan baru pertama kali sehingga membutuhkan koordinasi dan konsultasi terkait proses pelaksanaannya.
					2	SDM	org	12,00	12,00	100,00	
					3	Waktu	bulan	12,00	12,00	100,00	
				Keluaran	1	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen	1,00	1,00	100,00	
				Hasil	1	Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Dokumen	1,00	1,00	100,00	

NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	REALISASI		PENGUKURAN KINERJA SUB KEGIATAN							PERMASALAHAN DAN SOLUSI
		FISIK (%)	KEU (%)	INDIKATOR			SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	
47	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	100,00	59,73	Masukan	1	Dana	Rupiah	29.056.000,00	17.355.805,00	59,73	Belum adanya ketentuan teknis terkait Insentif dan dis insentif Belum adanya Juknis dari Kementerian terkait insentif dan disinsentif
					2	SDM	org	12,00	12,00	100,00	
					3	Waktu	bulan	12,00	12,00	100,00	
				Keluaran	1	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Berita Acara	2,00	2,00	100,00	
				Hasil	1	Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Dokumen	1,00	1,00	100,00	
	TOTAL / RATA - RATA	90,54	84,23					58.489.622.223,00	49.266.722.274,00		

Target Capaian Renstra 2024 - 2026

No.	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian							Kondisi Akhir
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Masih tingginya tingkat kemacetan lalu lintas	Meningkatnya kenyamanan pengguna jalan kota	Meningkatnya Pelayanan Transportasi yang Terpadu dan Berkualitas	Persentase tingkat kemantapan jalan (%)	92,40%	93,00%	93,50%	94,00%	93,37%	94,87%	95,12%	98,43%	98,43%
2	Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas bangunan	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur bangunan	Terwujudnya Kualitas Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	Persentase Bangunan Gedung Negara dengan Kondisi Baik		-	-	-	71,00%	72,50%	73,00%	73,50%	73,50%
				Persentase jasa konstruksi tenaga terampil yang bersertifikasi		-	-	-	-	-	14,86%	17,62%	17,62%
3	Belum optimalnya kesesuaian pembangunan dengan perencanaan tata ruang	Meningkatnya kesesuaian pembangunan dengan rencana tata ruang	Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Perencanaan Tata Ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	59,00%	60,00%	60,00%	61,00%	62,00%	62,00%	62,20%	70,92%	70,92%

BAB IV

PENUTUP

B A B I V

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi ini disusun berdasarkan hasil analisa kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 dan didasarkan pada analisis obyektif terhadap data, fakta dan informasi yang sebenarnya.

Dengan disusunnya laporan ini diharapkan menjadi bahan koreksi dan pedoman bagi pelaksanaan upaya pencapaian Kinerja Dinas untuk menunjang Visi dan Misi Kota Cimahi pada tahun-tahun mendatang. Sehingga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi diharapkan dapat menjadi salah satu Dinas andalan Pemerintah Kota Cimahi.

Demikian pula dengan hambatan dan kendala pelaksanaan tugas dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran. Permasalahan yang dihadapi pada Tahun Anggaran 2024 ini pada umumnya lebih pada permasalahan internal yang menyangkut persiapan pelaksanaan kegiatan dan koordinasi antar Dinas/Instansi/Lembaga di daerah maupun di pusat, serta permasalahan baru yang muncul bersamaan pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan. Hal ini menjadi kendala yang umum ditemukan pada sistem pemerintahan baru seperti halnya Pemerintah Kota Cimahi.

Permasalahan dan kendala eksternal yang menyangkut kesadaran partisipasi masyarakat yang dirasakan masih kurang dalam menjaga dan memelihara sarana dan prasarana pemukiman/perkotaan tetap menjadi permasalahan yang harus terus diupayakan peningkatannya.

Permasalahan tersebut diatas kiranya dapat diatasi melalui peningkatan koordinasi, hubungan dan kerjasama yang baik antar Dinas, Instansi dan Lembaga khususnya di Kota Cimahi. Sedangkan untuk peningkatan partisipasi masyarakat perlu terus ditingkatkannya sosialisasi dan proses pemberdayaan masyarakat yang merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh stake holder di Kota Cimahi.

Penyusunan laporan ini masih jauh dari sempurna dan bersifat terbuka untuk diadakan koreksi dan penyesuaian serta perbaikan di masa datang sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Namun demikian, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan yang dimaksudkan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan sebagai media pertanggungjawaban publik, diharapkan menjadi sarana bagi upaya perwujudan *Clean Government* dan *Good Governance*.